

Nomor : 1268/Bawaslu/SJ/KP.04.00/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Seleksi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

18 September 2020

Kepada Yth.:

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

(sebagaimana daftar terlampir)

di -

Tempat

Dalam rangka Pengisian Jabatan Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/378/M.KT.01/2020 perihal Pertimbangan Tertulis Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi pengisian Jabatan Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di 19 (sembilan belas) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan 62 (enam puluh dua) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan nama-nama calon peserta seleksi baik dari unsur Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diusulkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai jabatannya sekarang atau diusulkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya dan dapat mengusulkan nama-nama calon diluar Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Persyaratan umum adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapat surat rekomendasi/persetujuan untuk mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi asal. **Dikecualikan** bagi PNS yang sudah bekerja di Bawaslu dan memiliki masa kerja di Bawaslu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, surat rekomendasi/persetujuan untuk mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dapat diganti dengan SK Dipekerjakan/Surat Penugasan di Bawaslu dari Instansi induk/asal;
 - b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - c. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan III/d untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A;
 - d. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Penata golongan III/c untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B;
 - e. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - g. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau telah mengikuti dan lulus Diklat Penjenjangan Fungsional Ahli Muda untuk pemangku Jabatan Fungsional;
 - j. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana.
3. Persyaratan khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki;
 - b. Menguasai manajemen pentahapan Pemilu;

- c. Menguasai reformasi birokrasi;
 - d. Menguasai pengetahuan manajemen sumber daya manusia;
 - e. Menguasai pengelolaan perencanaan program dan anggaran;
 - f. Menguasai manajemen BMN;
 - g. Menguasai pengelolaan kegiatan hubungan masyarakat; dan
 - h. Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.
4. Seleksi akan dilakukan dengan Metode Uji Kesesuaian (Jobfit) oleh Panitia Seleksi Bawaslu yang terdiri dari Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Para Karo dan Kabag SDM di Lingkungan Sekretariat Jenderal selaku Tim Penilai Kinerja, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi terkait selaku pejabat penilai dari Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota terkait;
5. Peserta melakukan pendaftaran dengan mengirimkan dokumen persyaratan administrasi yang terdiri atas:
- a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah;
 - b. Surat lamaran yang dibubuhinya meterai Rp.6000 dan ditandatangani (contoh sebagaimana Lampiran III);
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Ijazah yang dipersyaratkan;
 - e. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - f. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan sekurang-kurangnya Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda yang pernah dijabat paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. Sertifikat Diklat Kepemimpinan atau Diklat Fungsional sesuai persyaratan;
 - h. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur minimal bernilai baik, tahun 2018 dan tahun 2019;
 - i. Surat rekomendasi/persetujuan untuk mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Surat Keputusan dipekerjakan/Surat Penugasan di Bawaslu dari Instansi induk/asal bagi PNS yang sudah bekerja di Bawaslu dan memiliki masa kerja di Bawaslu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - j. Pakta Integritas yang ditandatangani (contoh sebagaimana Lampiran IV);
 - k. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - l. Tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN Tahun 2019;
 - m. Tanda bukti penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2019;
 - n. Mengisi formulir pendaftaran dan form daftar riwayat hidup melalui tautan <https://bit.ly/KasekBawaslu>.
6. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 5 huruf a s.d. huruf m dikirim melalui alamat email: seleksiterbuka@bawaslu.go.id dalam format (.pdf) paling lambat tanggal 29 September 2020.
7. Pengisian formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup sebagaimana angka 5 huruf n paling lambat tanggal 29 September 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu akan segera bersurat kepada Bupati/Walikota untuk menyampaikan informasi terkait dengan pengisian Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Sekretaris Jenderal,



Dr. Gunawan Suswantoro

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu (sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi;

DAFTAR PENERIMA SURAT SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU :

1. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
2. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
3. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU
4. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI
5. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
6. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
7. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
8. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
9. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
11. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
12. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
13. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
14. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN
15. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI
16. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
17. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
18. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
19. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
20. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
21. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
22. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
23. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
24. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH
25. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN
26. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
27. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO
28. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
29. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU
30. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
31. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA
32. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT

DAFTAR UNIT KERJA MANDIRI
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	KLASIFIKASI	ESELONISASI
1	KOTA NUNUKAN	A	III.A
2	KABUPATEN AGAM	A	III.A
3	KABUPATEN BANDUNG	A	III.A
4	KABUPATEN BANJAR	A	III.A
5	KABUPATEN CIANJUR	A	III.A
6	KABUPATEN KAPUAS HULU	A	III.A
7	KABUPATEN KARAWANG	A	III.A
8	KABUPATEN KEDIRI	A	III.A
9	KABUPATEN KETAPANG	A	III.A
10	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	A	III.A
11	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	A	III.A
12	KABUPATEN MANDAILING NATAL	A	III.A
13	KABUPATEN NIAS SELATAN	A	III.A
14	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	A	III.A
15	KABUPATEN PESISIR SELATAN	A	III.A
16	KABUPATEN RAJA AMPAT	A	III.A
17	KABUPATEN SERANG	A	III.A
18	KABUPATEN SIMALUNGUN	A	III.A
19	KABUPATEN TASIKMALAYA	A	III.A
20	KOTA BALIKPAPAN	B	III.B
21	KOTA BANDAR LAMPUNG	B	III.B
22	KOTA BANJARMASIN	B	III.B
23	KOTA BATAM	B	III.B
24	KOTA BITUNG	B	III.B
25	KOTA DENPASAR	B	III.B
26	KOTA DUMAI	B	III.B
27	KOTA MAKASSAR	B	III.B
28	KOTA MANADO	B	III.B
29	KOTA MATARAM	B	III.B
30	KOTA MEDAN	B	III.B
31	KOTA PALU	B	III.B
32	KOTA SAMARINDA	B	III.B
33	KOTA SEMARANG	B	III.B
34	KOTA SURABAYA	B	III.B
35	KOTA TANGERANG SELATAN	B	III.B
36	KOTA TERNATE	B	III.B
37	KOTA TIDORE	B	III.B
38	KABUPATEN BADUNG	B	III.B
39	KABUPATEN BANGKA TENGAH	B	III.B
40	KABUPATEN BANTUL	B	III.B
41	KABUPATEN BARRU	B	III.B
42	KABUPATEN BATANGHARI	B	III.B
43	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	B	III.B
44	KABUPATEN BELU	B	III.B
45	KABUPATEN BINTAN	B	III.B

NO	KABUPATEN/KOTA	KLASIFIKASI	ESELONISASI
46	KABUPATEN BONE BOLANGO	B	III.B
47	KABUPATEN BURU SELATAN	B	III.B
48	KABUPATEN DEMAK	B	III.B
49	KABUPATEN GORONTALO	B	III.B
50	KABUPATEN GOWA	B	III.B
51	KABUPATEN GRESIK	B	III.B
52	KABUPATEN KEEROM	B	III.B
53	KABUPATEN KENDAL	B	III.B
54	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	B	III.B
55	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	B	III.B
56	KABUPATEN MALAKA	B	III.B
57	KABUPATEN MALINAU	B	III.B
58	KABUPATEN MAMUJU	B	III.B
59	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	B	III.B
60	KABUPATEN MANOKWARI	B	III.B
61	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	B	III.B
62	KABUPATEN MAROS	B	III.B
63	KABUPATEN MERAUKE	B	III.B
64	KABUPATEN MUNA	B	III.B
65	KABUPATEN OGAN ILIR	B	III.B
66	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	B	III.B
67	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	B	III.B
68	KABUPATEN PELALAWAN	B	III.B
69	KABUPATEN PESAWARAN	B	III.B
70	KABUPATEN POSO	B	III.B
71	KABUPATEN REJANG LEBONG	B	III.B
72	KABUPATEN SELUMA	B	III.B
73	KABUPATEN SEMARANG	B	III.B
74	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	B	III.B
75	KABUPATEN SIAK	B	III.B
76	KABUPATEN SIDOARJO	B	III.B
77	KABUPATEN SIGI	B	III.B
78	KABUPATEN SLEMAN	B	III.B
79	KABUPATEN SUPRIORI	B	III.B
80	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	B	III.B
81	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	B	III.B

Lampiran III Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : 1268/Bawaslu/SJ/KP.04.00/IX/2020
Tanggal : 18 September 2020

....., 2020

Yth. Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota

di -
Jakarta

Sehubungan dengan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat Golongan/Ruang :
Jabatan :

mengajukan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota *) dan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya telah menyampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan melalui alamat email: seleksiterbuka@bawaslu.go.id dan telah mengisi formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup melalui tautan <https://bit.ly/KasekKabKotaBawaslu>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai
Rp. 6000,- & ttd

(.....)
NIP.

*) diisi sesuai nama Kabupaten/Kota yang dilamar

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan Saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Akan bersikap jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Akan bekerja secara berdisiplin dan berdedikasi dalam memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan lembaga Bawaslu; dan
5. Akan memegang teguh rahasia negara dan jabatan serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalan fungsi sebagai Aparatur Sipil negara yang menjadi abdi masyarakat dan abdi negara.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2020

Hormat Saya,

(.....)
NIP.